

Komisi III Panggil PPATK 20 Maret soal Rp 300 T di Kemenkeu Bukan Korupsi

Pernyataan Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana soal transaksi mencurigakan Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan masih disorot publik. Ia mengklarifikasi dan menyimpulkan, transaksi sejak 2009 itu bukan praktik korupsi. Anggota Komisi III DPR Hince Pandjaitan memastikan pihaknya akan memanggil PPATK terkait hal ini. Mereka akan meminta penjelasan PPATK lebih transparan pada rapat pekan depan. "Kita panggil PPATK untuk klarifikasi soal Rp 300 triliun di Kemenkeu, ke Komisi III DPR RI. Senin, 20 Maret 2023 agar terang benderang duduk soalnya," kata Hince, Kamis (16/3). Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta kasus ini dibuka seterang-terangnya karena sudah terlalu membingungkan publik. Ia pun mengaku heran mengapa isu itu disimpulkan secara cepat oleh PPATK. Ini publik sudah telanjur dibuat bingung oleh banyaknya narasi yang beredar. Jadi saya minta temuan ini tolong benar-benar diusut tuntas. Pun kalau sudah clear, para pemangku kepentingan punya tanggung jawab untuk buka kasus ini seterang-terangnya kepada publik," kata Sahroni kepada wartawan, Rabu (15/3). "Kok bisa isunya tiba-tiba clear, dan disimpulkan secepat itu?" lanjutnya. Beberapa waktu lalu, Menkopolhukam Mahfud MD menyebut Rp 300 triliun tersebut merupakan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh 467 orang di Kemenkeu berdasarkan 197 Laporan Hasil Analisis (LHA) transaksi keuangan sejak tahun 2009 hingga 2023. Dalam klarifikasinya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan angka Rp 300 triliun yang dia laporkan bukanlah praktik korupsi yang dilakukan pegawai Kementerian Keuangan, melainkan hasil dari kasus tindak pidana asal. Namun, ia tidak menjelaskan tindak pidana yang dimaksud. "Dalam kerangka itu perlu dipahami, ini bukan tentang adanya abuse of power dan adanya korupsi yang dilakukan pegawai Kementerian Keuangan," kata Ivan di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (14/3). "Tapi ini lebih kepada tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yang menangani kasus tindak pidana asal. Yang menjadi kewajiban kami pada saat kami melakukan analisis, kami sampaikan ke Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti," sambungnya. Irjen Kemenkeu Awan

Nurmawan juga menegaskan angka Rp 300 triliun tersebut bukan merupakan kasus korupsi pegawai Kemenkeu.